

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup individu sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat secara kolektif. Melalui pendidikan, seseorang belajar berpikir kritis, mengembangkan keterampilan yang produktif, serta membangun kemampuan berinovasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Panoyo, 2025). Oleh karena itu, pendidikan menjadi dasar dalam membentuk manusia yang adaptif dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman.

Pentingnya pendidikan juga ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi dasar tanggung jawab negara untuk memastikan akses pendidikan tersedia secara adil dan merata. Dalam kerangka otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, melainkan juga berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang mendukung kelompok masyarakat kurang mampu.

Jika dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, pendidikan berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan inovasi, dan daya saing nasional di tengah persaingan global. Sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan dapat memperkuat kemiskinan struktural dan membatasi mobilitas sosial antar generasi (Kardina & Magriasti,

2025). Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun, pemerataan akses pendidikan di wilayah perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta tidak selalu berjalan mudah. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, Jakarta memiliki tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Perbedaan kemampuan ekonomi antar keluarga berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tidak hanya biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan pendukung seperti transportasi dan perlengkapan belajar (Ramdayani & Islam, 2025). Dalam kondisi seperti ini, risiko ketimpangan akses pendidikan dan potensi putus sekolah menjadi persoalan yang nyata.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar dalam mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima bantuan. Data ini memuat indikator kondisi ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan kepala keluarga, serta akses terhadap layanan dasar (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023). Secara konsep, sistem ini dirancang agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan indikator administratif tidak selalu mampu menggambarkan kondisi nyata keluarga di lapangan. Dalam beberapa kasus, data yang tercatat dalam sistem berbeda dengan situasi sosial ekonomi yang sebenarnya dialami oleh keluarga tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai kebijakan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Program ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. KJP bertujuan membantu siswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa terkendala biaya. Bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan pendukung proses belajar.

Penentuan penerima KJP dilaksanakan melalui pemadanan berbagai sistem data yang saling terintegrasi. DTKS digunakan sebagai dasar untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga, DAPODIK berfungsi memastikan bahwa siswa berstatus aktif dalam satuan pendidikan, sedangkan JAKEDU mendukung pengelolaan dan sinkronisasi data pendidikan di lingkungan DKI Jakarta. Dalam rangkaian proses tersebut, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan ekonomi peserta didik. Peran sekolah lebih difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, validasi dokumen, serta konfirmasi status keaktifan siswa sebelum data diproses dalam sistem pemerintah daerah. Penetapan akhir mengenai siapa yang berhak menerima bantuan sepenuhnya ditentukan melalui proses verifikasi dan pencocokan data oleh instansi yang berwenang, terutama Dinas Sosial.

Secara konseptual, mekanisme ini disusun untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Akan tetapi, efektivitas suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan sistem dan regulasi yang tersusun rapi. Pelaksanaan di lapangan memegang peranan yang tidak kalah penting, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, kejelasan alur komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan aparatur yang terlibat secara langsung.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program di tingkat sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan tersebut sering kali tidak terlihat pada tahap perumusan kebijakan, tetapi muncul ketika kebijakan diimplementasikan. Beberapa kendala yang kerap ditemui antara lain keterbatasan akses terhadap informasi yang rinci, perbedaan pemahaman antar pelaksana, hingga gangguan teknis yang memengaruhi kepastian status penerima bantuan. Situasi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap implementasi kebijakan menjadi hal yang penting dilakukan, guna memastikan bahwa tujuan program benar-benar tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sejak awal.

Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif satuan pendidikan sebagai pelaksana di tingkat operasional. Di lingkungan sekolah, kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan siswa, pengumpulan serta pengunggahan dokumen administrasi, hingga penyampaian informasi kepada orang tua terkait mekanisme program. Namun, sejak adanya perubahan kebijakan pada tahun 2022, proses verifikasi kelayakan penerima sepenuhnya dialihkan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dengan perubahan tersebut, sekolah tidak lagi berperan dalam survei lapangan maupun penilaian kondisi ekonomi peserta didik, sehingga tidak memiliki akses terhadap dasar pertimbangan teknis ketika terjadi perubahan atau penghentian bantuan.

Pengalihan kewenangan ini turut memengaruhi pola komunikasi kebijakan di tingkat sekolah. Informasi yang diterima umumnya terbatas pada hasil akhir yang tercantum dalam sistem, tanpa disertai uraian rinci mengenai indikator atau alasan di balik keputusan tersebut. Ketika bantuan dihentikan, sekolah tetap menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa dan orang tua, meskipun tidak memiliki kewenangan maupun informasi yang memadai untuk memberikan penjelasan secara komprehensif. Situasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan dapat memengaruhi persepsi penerima manfaat terhadap tingkat keterbukaan dan keadilan dalam pelaksanaan program.

Di luar persoalan komunikasi, implementasi KJP di lingkungan sekolah juga dihadapkan pada berbagai hambatan teknis. Ketidaksinkronan data kependudukan, perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta lambatnya pembaruan informasi dalam sistem sering kali memengaruhi kejelasan status penerima bantuan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi siswa dan orang tua. Selain itu, jumlah tenaga pelaksana yang terbatas, ditambah dengan tingginya beban pekerjaan administratif, turut memengaruhi kelancaran dan ketepatan waktu pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya dan stabilitas sistem informasi merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Di sisi lain, pola birokrasi yang masih bersifat sentralistik turut membatasi fleksibilitas sekolah dalam merespons kondisi faktual peserta didik. Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi ulang ataupun mengajukan pertimbangan substantif apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil verifikasi sistem dengan realitas ekonomi siswa. Keterbatasan ini membuat sekolah berada dalam posisi yang kurang leluasa ketika harus menanggapi persoalan yang muncul di lapangan.

Dukungan internal sekolah terhadap pelaksanaan KJP dapat dikatakan cukup baik. Kepala sekolah, operator, dan wali kelas menunjukkan komitmen serta sikap responsif dalam mendampingi siswa agar tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala struktural dan administratif yang berada di luar kewenangan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kesungguhan pelaksana di tingkat satuan pendidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem serta dukungan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

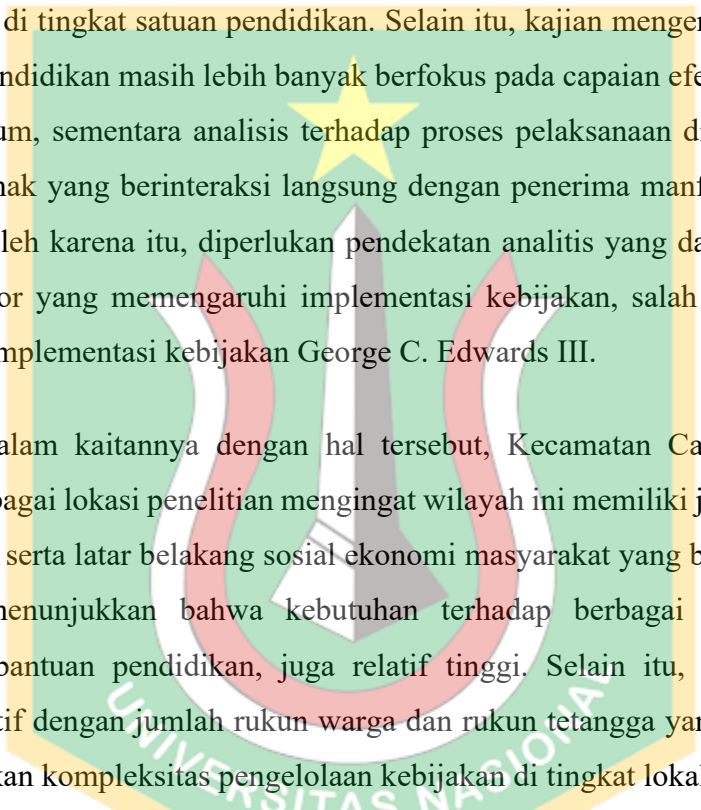
Terlepas dari dukungan tersebut, pelaksanaan Program KJP di tingkat operasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Perubahan mekanisme verifikasi, terbatasnya kewenangan sekolah, serta persoalan integrasi dan sinkronisasi data antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, serta keselarasan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya.

Di tingkat satuan pendidikan, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki peran penting dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. SMA Negeri 11 Jakarta yang berada di Kecamatan Cakung memiliki jumlah peserta didik sebanyak 648 siswa. Berdasarkan data administrasi sekolah tahun 2025 tahap 2, tercatat sebanyak 206 peserta didik menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Data tersebut

menunjukkan bahwa program KJP memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan bagi sebagian peserta didik di lingkungan sekolah.

Program Kartu Jakarta Pintar dirancang melalui mekanisme integrasi sistem data untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dengan kondisi faktual yang dihadapi pelaksana, khususnya di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, kajian mengenai implementasi bantuan pendidikan masih lebih banyak berfokus pada capaian efektivitas program secara umum, sementara analisis terhadap proses pelaksanaan di tingkat sekolah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya melalui kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Kecamatan Cakung dipandang relevan sebagai lokasi penelitian mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang besar serta latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap berbagai layanan publik, termasuk bantuan pendidikan, juga relatif tinggi. Selain itu, luasnya wilayah administratif dengan jumlah rukun warga dan rukun tetangga yang cukup banyak menunjukkan kompleksitas pengelolaan kebijakan di tingkat lokal.



Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	RW	RT	LMK
Pasar Rebo	235.825	52	524	52
Ciracas	319.395	49	609	49
Cipayung	306.337	56	509	56
Makasar	221.047	53	567	53
Kramat Jati	316.949	65	643	65
Jatinegara	318.382	91	1.111	91
Duren Sawit	444.264	97	1.111	95
Cakung	582.666	91	1.048	90
Pulogadung	296.845	95	1.035	95
Matraman	182.809	62	795	62
Total	3.224.519	711	7.951	708

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk dan Struktur Wilayah Kecamatan di Jakarta Timur
Sumber: Dashboard Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Timur (2025)

Kecamatan Cakung dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Jakarta Timur serta memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Berdasarkan data Dashboard Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Timur (2025), Kecamatan Cakung memiliki jumlah penduduk sekitar 582.666 jiwa dengan 91 RW dan 1.048 RT. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, keberadaan berbagai satuan pendidikan di wilayah ini, termasuk SMA Negeri 11 Jakarta sebagai lokasi penelitian, menjadikan Kecamatan Cakung relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan bantuan pendidikan seperti Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, Program Kartu Jakarta Pintar masih menghadapi sejumlah dinamika di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang dirancang secara normatif dengan pelaksanaannya di tingkat operasional. Permasalahan seperti ketidaksesuaian data penerima bantuan, keterlambatan pembaruan data dalam sistem, serta keterbatasan informasi yang diterima oleh pihak sekolah dan orang tua siswa menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melakukan kajian terhadap proses implementasi kebijakan guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta yang berada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada level daerah memegang peranan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan. Hal ini terutama relevan di Kecamatan Cakung sebagai

wilayah yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat serta dinamika sosial masyarakatnya. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi?
- b) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA Negeri 11 Jakarta berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dalam memperkuat pengembangan keilmuan administrasi publik dan kebijakan publik, terutama pada ranah implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal. Kajian ini menambah khazanah literatur implementasi kebijakan melalui penyajian temuan empiris pada level kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selama ini, level tersebut relatif belum banyak dijadikan fokus utama dalam penelitian akademik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual dalam memahami dinamika pelaksanaan program bantuan sosial di bidang pendidikan, khususnya Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), sekaligus memberikan penguatan terhadap relevansi teori implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam konteks praktik kebijakan di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi dan evaluasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), terutama pada tingkat kecamatan. Temuan yang diperoleh diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyempurnaan sistem pendataan, mekanisme sosialisasi, serta pengawasan program agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

b. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Cakung

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam meningkatkan peran aparatur wilayah dalam penyampaian informasi kebijakan, fasilitasi administrasi, serta pengawasan pelaksanaan Program KJP di tingkat lokal.

c. Masyarakat Penerima Manfaat KJP

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan KJP. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam mengawal distribusi bantuan serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan empiris bagi pengembangan studi lanjutan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pendidikan, baik pada wilayah berbeda maupun dalam kerangka perbandingan dengan kebijakan serupa di daerah lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur”* disusun untuk memberikan gambaran

mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengawali keseluruhan pembahasan dengan memaparkan konteks dan alasan dilaksanakannya penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang yang melandasi pentingnya kajian, perumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, disertakan pula batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup kajian serta uraian sistematika penulisan sebagai panduan alur pembahasan. Bab ini berfungsi memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi analisis implementasi Program KJP pada tingkat kecamatan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan difokuskan pada teori implementasi kebijakan publik, terutama perspektif George C. Edwards III yang digunakan sebagai kerangka analisis utama. Di samping itu, dipaparkan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan, konsep dasar mengenai Program KJP, serta konstruksi kerangka pemikiran yang menghubungkan teori dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Uraian mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, subjek serta objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Selain itu, dijelaskan pula langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data melalui prosedur validitas dan reliabilitas, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh di lapangan beserta analisisnya. Hasil penelitian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang telah dibahas sebelumnya. Pembahasan difokuskan

pada dinamika pelaksanaan Program KJP di tingkat lokal, termasuk identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasinya di Kecamatan Cakung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir ini merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, disampaikan rekomendasi yang bersifat aplikatif sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pihak sekolah, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Program KJP ke depan.

